

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR APLIKASI PEMERINTAH DIGITAL NOMOR 25 TAHUN 2025 **TENTANG**

STANDAR PELAYANAN NAMA DOMAIN INSTANSI PEMERINTAH

DIREKTUR APLIKASI PEMERINTAH DIGITAL,

Menimbang

- bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan : a. Publik sesuai dengan penyelenggaraan asas pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
 - bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan b. kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan dan selaras masyarakat, dengan kemampuan sehingga penyelenggara mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - berdasarkan bahwa pertimbangan sebagaimana c. dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Direktur Aplikasi Pemerintah Keputusan

tentang Standar Pelayanan Nama Domain Instansi Pemerintah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;
 - 8. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pengelola Nama
 Domain Internet Indonesia Nomor
 4006.037/1100/3200/E.2/VIII/2025 tentang
 Penetapan Biaya Transaksi Nama Domain.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR APLIKASI PEMERINTAH DIGITAL TENTANG STANDAR PELAYANAN NAMA DOMAIN INSTANSI PEMERINTAH KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan Nama Domain Instansi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari standar:

- a. Pendaftaran Nama Domain Instansi Pemerintah;
- b. Penonaktifan Nama Domain Instansi Pemerintah;
- c. Perpanjangan Nama Domain Instansi Pemerintah;
- d. Perubahan Nama Domain Instansi Pemerintah;
- e. Perubahan Pejabat Nama Domain Instansi Pemerintah;
- f. Transfer Nama Domain Instansi Pemerintah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2025 DIREKTUR APLIKASI PEMERINTAH DIGITAL

YESSI ARNAZ FERARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR APLIKASI
PEMERINTAH DIGITAL
NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
PELAYANAN NAMA DOMAIN INSTANSI
PEMERINTAH

I. Pendaftaran Nama Domain Instansi Pemerintah

No	Komponen	Uraian	
Pen	Penyampaian Layanan		
1	Persyaratan	Pejabat Nama Domain: 1. Memiliki e-mail instansi atau akun di mail.go.id 2. Berstatus sebagai PNS / TNI / Polri / pegawai tetap instansi 3. Memiliki jabatan paling rendah administrator atau jabatan fungsional ahli madya di bidang atau menangani urusan teknologi informasi dan komunikasi 4. Memiliki akun (username) di aplikasi registrar Domain.go.id Kelengkapan dokumen (format PDF): 1. Surat permohonan pendaftaran nama domain 2. Dasar hukum pembentukan instansi atau layanan publik nasional atau kegiatan berskala nasional / internasional 3. Surat penunjukan Pejabat Nama Domain 4. Kartu pegawai 5. Surat kuasa dari kepala desa pada pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya (untuk desa.id) 6. Surat keterangan (untuk layanan/kegiatan) Masa aktif nama domain:	
		 Rentang waktu paling lama 5 (lima) tahun Rekomendasi penonaktifan dikeluarkan setelah 35 (tiga puluh lima) hari kalender melewati masa aktif 	

(satu) tahun sejak tanggal penonaktifan	etelah 1
Pengguna mendaftarkan nama domain yan tersedia (first come first serve) dan masa akti Pengguna menginput data instansi dan men (upload) dokumen persyaratan Admin Komdigi melakukan verifikasi d	f gunggah lokumen erbaikan an revisi tagihan a NDI dan ran dan dapat mulai 7
Bila dokumen lengkap: 1 (satu) hari kerja, dengangangan perasional 08.00 s.d. 16.00 WIB Bila perlu perbaikan dokumen: maksimal 4 (anganganganganganganganganganganganganga	
Rp 50.000 per tahun (di luar PPN 11%) dibayar 4 Biaya / Tarif rekening PANDI. Nama domain desa.id gratis tahun pertama.	
5 Produk Nama Domain Instansi Pemerintah (go.id, desa Pelayanan	.id)
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan E-mail: helpdeskdomain@mail.komdigi.go.id Kanal: https://servicedesk.layanan.go.id WhatsApp: 0812-9292-0929 / 0852-1126-0914	
Pengelolaan Pelayanan	
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik	tentang

		 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik Surat Keputusan Dewan Pengurus Pengelola Nama Domain Internet Indonesia Nomor 4006.037/1100/3200/E.2/VIII/2025 tentang Penetapan Biaya Transaksi Nama Domain
2.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	 Komputer / laptop Jaringan internet Aplikasi registrar Domain.go.id
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami persyaratan nama domain instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku Menguasai penggunaan aplikasi registrar Mampu berkomunikasi aktif dengan pengguna nama domain dan pengelola registri PANDI
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan berjenjang, mulai dari Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital, Ketua Tim Pembinaan JF Penata Kelola Informatika SPBE dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah, dan PIC Nama Domain
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai standar dan SOP yang telah ditetapkan Petugas pelaksana layanan memiliki kompetensi yang memadai, responsif dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersimpan dan terkelolanya data nama domain instansi pemerintah secara digital sesuai standar teknis layanan registrar nama domain serta mematuhi ketentuan pelindungan data pribadi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat Evaluasi Organisasi Internal Penilaian Kinerja Bulanan di lingkungan Tim JF SPBE dan Nama Domain Survei Kepuasan Layanan

II. Penonaktifan Nama Domain Instansi Pemerintah

No	Komponen	Uraian	
Pen	Penyampaian Layanan		
1	Persyaratan	Kelengkapan dokumen (format PDF): 1. Surat permohonan penonaktifan nama domain 2. Surat penunjukan Pejabat Nama Domain 3. Kartu pegawai	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pengguna mengajukan surat permohonan melalui sarana pengaduan / helpdesk Admin melakukan verifikasi persyaratan Admin mengganti status nama domain menjadi 'clientHold' melalui aplikasi registrar console PANDI dan mengirim hasil ke pengguna Nama domain nonaktif akan dihapus permanen mengikuti ketentuan masa aktif Permohonan terkait aduan konten negatif akan diteruskan ke Direktorat Pengendalian Ruang Digital melalui saluran koordinasi internal 	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja, dengan jam operasional 08.00 s.d. 16.00 WIB	
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)	
5	Produk Pelayanan	Nama Domain Instansi Pemerintah (go.id, desa.id)	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	E-mail: helpdeskdomain@mail.komdigi.go.id Kanal: https://servicedesk.layanan.go.id WhatsApp: 0812-9292-0929 / 0852-1126-0914	
Pen	Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	

		 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik
2.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	 Komputer / laptop Jaringan internet Aplikasi registrar console PANDI
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami persyaratan nama domain instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku Menguasai penggunaan registrar console PANDI Mampu berkomunikasi aktif dengan pengguna nama domain dan pengelola registri PANDI
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan berjenjang, mulai dari Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital, Ketua Tim Pembinaan JF Penata Kelola Informatika SPBE dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah, dan PIC Nama Domain
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai standar dan SOP yang telah ditetapkan Petugas pelaksana layanan memiliki kompetensi yang memadai, responsif dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersimpan dan terkelolanya data nama domain instansi pemerintah secara digital sesuai standar teknis layanan registrar nama domain serta mematuhi ketentuan pelindungan data pribadi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Evaluasi Organisasi Internal Penilaian Kinerja Bulanan di lingkungan Tim JF SPBE dan Nama Domain

III. Perpanjangan Nama Domain Instansi Pemerintah

No	Komponen	Uraian	
Pen	Penyampaian Layanan		
1	Persyaratan	Pengguna nama domain memiliki akun (username) di aplikasi registrar Domain.go.id	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pengguna mengajukan perpanjangan nama domain dengan rentang waktu paling lama 5 (lima) tahun melalui aplikasi Tagihan dikirimkan ke e-mail pengguna Pengguna membayar biaya ke rekening PANDI dan mengirim bukti transfer melalui aplikasi Admin PANDI mengecek bukti pembayaran dan melakukan perpanjangan nama domain Masa aktif nama domain bertambah sesuai pengajuan rentang waktu Pengguna memperbarui data kontak dan instansi bila terjadi perubahan pejabat atau organisasi 	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja, dengan jam operasional 08.00 s.d. 16.00 WIB	
4	Biaya / Tarif	Rp 50.000 per tahun (di luar PPN 11%) dibayarkan ke rekening PANDI	
5	Produk Pelayanan	Nama Domain Instansi Pemerintah (go.id, desa.id)	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	E-mail: helpdeskdomain@mail.komdigi.go.id Kanal: https://servicedesk.layanan.go.id WhatsApp: 0812-9292-0929 / 0852-1126-0914	
Pen	Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) 	

		 Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik Surat Keputusan Dewan Pengurus Pengelola Nama Domain Internet Indonesia Nomor 4006.037/1100/3200/E.2/VIII/2025 tentang Penetapan Biaya Transaksi Nama Domain
2.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	 Komputer / laptop Jaringan internet Aplikasi registrar Domain.go.id
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami persyaratan nama domain instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku Menguasai penggunaan aplikasi registrar Mampu berkomunikasi aktif dengan pengguna nama domain dan pengelola registri PANDI
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan berjenjang, mulai dari Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital, Ketua Tim Pembinaan JF Penata Kelola Informatika SPBE dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah, dan PIC Nama Domain
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai standar dan SOP yang telah ditetapkan Petugas pelaksana layanan memiliki kompetensi yang memadai, responsif dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersimpan dan terkelolanya data nama domain instansi pemerintah secara digital sesuai standar teknis layanan registrar nama domain serta mematuhi ketentuan pelindungan data pribadi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat Evaluasi Organisasi Internal Penilaian Kinerja Bulanan di lingkungan Tim JF SPBE dan Nama Domain Survei Kepuasan Layanan

IV. Perubahan Nama Domain Instansi Pemerintah

No	Komponen	Uraian	
Pen	Penyampaian Layanan		
1	Persyaratan	Pengguna nama domain memiliki akun (username) di aplikasi registrar Domain.go.id Kelengkapan dokumen (format PDF): 1. Surat permohonan perubahan nama domain 2. Dokumen untuk nama domain baru mengikuti ketentuan pendaftaran nama domain	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pengguna mengajukan surat permohonan melalui sarana pengaduan / helpdesk Admin melakukan inventarisir dokumen sebagai pelengkap persyaratan pendaftaran Pengguna mendaftarkan nama domain baru melalui aplikasi registrar Penghapusan nama domain lama selambatnya dalam 2 (dua) tahun atau atas permintaan instansi 	
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Bila dokumen lengkap: 1 (satu) hari kerja, dengan jam operasional 08.00 s.d. 16.00 WIB Nama domain baru mengikuti ketentuan pendaftaran	
4	Biaya / Tarif	Mengikuti ketentuan pendaftaran nama domain	
5	Produk Pelayanan	Nama Domain Instansi Pemerintah (go.id, desa.id)	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	E-mail: helpdeskdomain@mail.komdigi.go.id Kanal: https://servicedesk.layanan.go.id WhatsApp: 0812-9292-0929 / 0852-1126-0914	
Pengelolaan Pelayanan			
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) 	

		3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik
2.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	 Komputer / laptop Jaringan internet Aplikasi registrar Domain.go.id
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami persyaratan nama domain instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku Menguasai penggunaan aplikasi registrar Mampu berkomunikasi aktif dengan pengguna nama domain dan pengelola registri PANDI
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan berjenjang, mulai dari Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital, Ketua Tim Pembinaan JF Penata Kelola Informatika SPBE dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah, dan PIC Nama Domain
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai standar dan SOP yang telah ditetapkan Petugas pelaksana layanan memiliki kompetensi yang memadai, responsif dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersimpan dan terkelolanya data nama domain instansi pemerintah secara digital sesuai standar teknis layanan registrar nama domain serta mematuhi ketentuan pelindungan data pribadi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat Evaluasi Organisasi Internal Penilaian Kinerja Bulanan di lingkungan Tim JF SPBE dan Nama Domain

V. Perubahan Pejabat Nama Domain Instansi Pemerintah

No	Komponen	Uraian	
Pen	Penyampaian Layanan		
1	Persyaratan	Pejabat Nama Domain:	

		 Berstatus sebagai PNS / TNI / Polri / pegawai tetap instansi Memiliki jabatan paling rendah administrator atau jabatan fungsional ahli madya di bidang atau menangani urusan teknologi informasi dan
		komunikasi 4. Memiliki akun (username) di aplikasi registrar Domain.go.id
		Kelengkapan dokumen (format PDF): 1. Surat permohonan perubahan Pejabat Nama Domain 2. Surat penunjukan Pejabat Nama Domain 3. Kartu pegawai
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pengguna mendaftarkan akun baru di aplikasi registrar Domain.go.id Pengguna mengajukan permohonan perubahan Pejabat Nama Domain melalui aplikasi registrar Admin melakukan verifikasi dokumen Admin menyetujui perubahan Pejabat Nama Domain dan mengirim notifikasi ke pengguna
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja, dengan jam operasional 08.00 s.d. 16.00 WIB
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Nama Domain Instansi Pemerintah (go.id, desa.id)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	E-mail: helpdeskdomain@mail.komdigi.go.id Kanal: https://servicedesk.layanan.go.id WhatsApp: 0812-9292-0929 / 0852-1126-0914
Pen	gelolaan Pelayana	n
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)

		3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik
2.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	 Komputer / laptop Jaringan internet Aplikasi registrar Domain.go.id
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami persyaratan nama domain instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku Menguasai penggunaan aplikasi registrar Mampu berkomunikasi aktif dengan pengguna nama domain dan pengelola registri PANDI
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan berjenjang, mulai dari Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital, Ketua Tim Pembinaan JF Penata Kelola Informatika SPBE dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah, dan PIC Nama Domain
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai standar dan SOP yang telah ditetapkan Petugas pelaksana layanan memiliki kompetensi yang memadai, responsif dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersimpan dan terkelolanya data nama domain instansi pemerintah secara digital sesuai standar teknis layanan registrar nama domain serta mematuhi ketentuan pelindungan data pribadi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat Evaluasi Organisasi Internal Penilaian Kinerja Bulanan di lingkungan Tim JF SPBE dan Nama Domain Survei Kepuasan Layanan

VI. Transfer Nama Domain Instansi Pemerintah

No	Komponen	Uraian		
Penyampaian Layanan				

1	Persyaratan	 Kelengkapan dokumen (format PDF): 1. Surat permohonan transfer nama domain (hanya untuk ~.id) 2. Surat penunjukan Pejabat Nama Domain 3. Kartu pegawai
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pengguna mengajukan surat permohonan melalui sarana pengaduan / helpdesk Admin melakukan verifikasi dokumen Admin mengambil Authcode nama domain melalui aplikasi registrar console PANDI dan mengirim ke pengguna melalui e-mail Pengguna menerima Authcode untuk proses transfer nama domain pada registrar umum Admin mengecek hasil transfer dan melakukan pemutakhiran status nama domain
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja, dengan jam operasional 08.00 s.d. 16.00 WIB
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Nama Domain Instansi Pemerintah (hanya ~.id)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	E-mail: helpdeskdomain@mail.komdigi.go.id Kanal: https://servicedesk.layanan.go.id WhatsApp: 0812-9292-0929 / 0852-1126-0914
Pen	gelolaan Pelayana	n
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik
2.	Sarana, Prasarana, Fasilitas	 Komputer / laptop Jaringan internet Aplikasi registrar console PANDI

3.	Kompetensi Pelaksana	 Memahami persyaratan nama domain instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku Menguasai penggunaan registrar console PANDI Mampu berkomunikasi aktif dengan pengguna nama domain dan pengelola registri PANDI
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan berjenjang, mulai dari Dirjen Teknologi Pemerintah Digital, Direktur Aplikasi Pemerintah Digital, Ketua Tim Pembinaan JF Penata Kelola Informatika SPBE dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah, dan PIC Nama Domain
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan yang Memberikan Kepastian Pelayanan	 Pelayanan dilaksanakan sesuai standar dan SOP yang telah ditetapkan Petugas pelaksana layanan memiliki kompetensi yang memadai, responsif dan santun
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersimpan dan terkelolanya data nama domain instansi pemerintah secara digital sesuai standar teknis layanan registrar nama domain serta mematuhi ketentuan pelindungan data pribadi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Rapat Evaluasi Organisasi Internal Penilaian Kinerja Bulanan di lingkungan Tim JF SPBE dan Nama Domain

DIREKTUR APLIKASI PEMERINTAH DIGITAL

YESSI ARNAZ FERARI